

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DI DESA LUBUK KEMBANG SARI KECAMATAN UKUI
KABUPATEN PELALAWAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Indah Purnama Sari
NPM : 147110204

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Indah Purnama Sari
NPM : 147110204
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 25 Februari 2019

Pembimbing I, PEKANBARU Pembimbing II,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Dia Meirina Suri, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Admnitrasi Publik
Ketua,

Hendry Andry, S.Sos, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Indah Purnama Sari
NPM : 147110204
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Ketua,

Pekanbaru, 16 April 2019
Sekretaris,

Arief Rifa'i, S.Sos, M.Si

La Ode Syarfana, SE, M.Si

Anggota,

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Hendry Andry, S.Sos, M.Si

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Purnama Sari
NPM : 147110204
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 April 2019

An Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Arief Rifa'i, S.Sos, M.Si

La Ode Syarfana, SE, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Hendry Andry, S.Sos, M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga Tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak dan juga keponakan keponakanku serta adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahagiakan amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Hendry Andry, S.Sos, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan semangat, dukungan moril, dan juga memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Hendry Andry, S.Sos, M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Dia Meirina Suri, S.Sos, M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang juga telah dengan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada saya yang bertujuan untuk penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga, Ayah dan Ibu tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Administrasi Publik yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari.
9. Kepada seluruh pegawai Badan Usaha Milik Desa di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 25 Februari
2019

Penulis

Indah Purnama Sari



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan.....	16
2. Kegunaan.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Pengertian Administrasi	19
2. Pengertian Organisasi.....	21
3. Manajemen.....	21
4. Manajemen Sumber Daya Manusia	24
5. Kebijakan	26
6. Evaluasi	30
7. Tugas dan Fungsi	33
8. Pemerintah Desa.....	35
B. Kerangka Pikir	37
C. Konsep Operasional	38
D. Operasional Variabel.....	40
E. Teknik Pengukuran	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel	46

D. Teknik Penarikan Sampel	48
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan	51
1. Keadaan Penduduk	53
B. Profil Desa Lubuk Kembang Sari	53
C. Profil Bumdes (Fathonah) Desa Lubuk Kembang Sari	55
D. Struktur Organisasi Bumdes (Fathonah) Desa Lubuk Kembang Sari	56
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	58
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	59
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	60
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	62
1. Efektivitas	62
2. Efisien	66
3. Kecukupan	70
4. Perbandingan Fakta dengan Standar	74
5. Tindakan Koreksi	77
6. Ketepatan	81
C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Tentang Analisis Peran Kantor Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	84
D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Imigrasi Kota Pekanbaru terkait Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru	87
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Nama-Nama Kelurahan/Desa Di Kecamatan Ukui yang Sudah Memiliki BUMDes	10
I.2	: Pinjaman Modal Kerja Di BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	13
I.3	: Data Pinjaman yang Bermasalah Pada BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	14
II.1	: Operasional Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	40
III.1	: Populasi dan Sampel Penelitian Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	47
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Nasabah BUMDes	59
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Nasabah BUMDes	60
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Nasabah BUMDes	61
V.4	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes (Efektivitas)	63
V.5	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes (Efisiensi)	67
V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes (Kecukupan)	70
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes (Pemerataan)	74
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes (Responsivitas)	78
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Nasabah BUMDes (Ketepatan)	81
V.10	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden terkait penelitian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Daftar Kuisisioner Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	93
2.	Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	98
3.	Rekap Telly Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	105
4.	Photo Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	108
5	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	112
	Surat Rekomendasi Riset Universitas Islam Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	113
5	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Terkait Degan Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan BUMDes Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	37
IV.I : Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	57



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Purnama Sari
NPM : 147110204
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Februari 2019
Pelaku Pernyataan,

Indah Purnama Sari

Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Oleh
Indah Purnama Sari

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan BUMDes

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BUMDes Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Indikator dari penelitian ini adalah Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di BUMDes Fathonah Di Kabupaten Pelalawan ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisaris (Penasehat) BUMDesa Fathonah, Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD), Direktur BUMDesa Fathonah, dan Nasabah BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah tehnik sampling jenuh (sensus) untuk populasi Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisaris (Penasehat) BUMDesa Fathonah, Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD), Direktur BUMDesa Fathonah dan teknik purposive sampling untuk nasabah, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan “Cukup Baik”.

Evaluation of Management of Village Business Entities (BUMDes) in Lubuk Kembang Sari Village, Ukui District, Pelalawan Regency

Abstract

By

Inda Purnama Sari

Keywords: *Evaluation, Management of BUMDes*

This study aims to determine the management of BUMDes in Lubuk Kembang Sari Village, Ukui District, Pelalawan Regency. The indicators of this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. This type of research located on BUMDes Fathonah in Pelalawan Regency is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the research objectives in the studied location. The population used in this research is Lubuk Kembang Sari Village Head as Commissioner (Advisor) BUMDesa Fathonah, BUMDesa Fathonah Supervisor (BPD Chair), Director of BUMDesa Fathonah, and BUMDesa Fathonah Customer Lubuk Kembang Sari Village. The sampling technique used in determining individual samples is the saturation (census) sampling technique for the population of Lubuk Kembang Sari Village Head As Commissioner (Advisor) BUMDesa Fathonah, BUMDesa Fathonah Supervisor (BPD Chair), BUMDesa Fathonah Director and purposive sampling technique for customers and the data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Evaluation of Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Lubuk Kembang Sari Village, Ukui District, Pelalawan Regency was "Good enough"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara terminologi apa yang di sebut “ administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika di bubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Menurut Ali (2004:12) administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja di dasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realistik empirik tentang esensi eksistensi manusia dalam pencapaian tujuan bersama.

Dalam menjalankan administrasi maka di perlukan sebuah organisasi sebagai wadah untuk menjalankan administrasi tersebut, organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan individu dalam satu kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah di ciptakan secara sistematis dan struktural. Dalam pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi di perlukan adanya manajemen, yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

Menurut Siagian (dalam Ali Farid, 2004:174) administrasi negara yaitu sebagai keseluruhan kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara, memberikan implikasi pengertian bahwa apa yang menjadi kegiatan para administrator (pelaku administrasi) adalah sesuatu yang kompleks dan rumit serta menjangkau lapangan kegiatan yang luas.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Keberhasilan pembangunan dapat terjadi apabila tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, trampil, dan respon terhadap tuntutan masyarakat. Di harapkan pula aktor pembaruan tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua kegiatan di mata publik secara transparansi baik fisik maupun non fisik, bahkan yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran.

Hakekat pembangunan merupakan rangkaian kegiatan melakukan perubahan yang di laksanakan secara sengaja, sadar dan terencana untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok orang. Kemajuan yang ingin di capai itu sifatnya multi dimensional dan bentuknya bermacam ragam. Semua usaha itu adalah semata-mata untuk membangun bangsa "*nation building*" di tengah pesatnya tuntutan perkembangan zaman. Pemerataan pembangunan merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak kepada sebuah tindak kriminalitas dan perlawanan masyarakat kepada pemerintah yang dapat menyebabkan munculnya bermacam-macam anggapan negatif dan rendahnya martabat serta wibawa pemerintah dimata masyarakat. Karenanya pula pemerintah di tuntutan untuk arif dan bijaksana serta adil melihat dan melakukan

sebuah kebijakan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.

Pembangunan bila di lihat dari pemerintahan daerah, dimana daerah di beri kewenangan dan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi yang tersedia. Maka yang menjadi titik sentral pembangunan adalah wilayah pedesaan, dengan alasan bahwa Desa merupakan lingkup terkecil sebuah negara dengan jumlah begitu banyak pada masalah pembangunan jarang tersentuh secara baik. Padahal Desa merupakan persekutuan masyarakat hukum yang tinggal di suatu wilayah secara integral dengan hidup berpedoman pada kebiasaan adat istiadat dan memiliki banyak potensi yang dapat menunjang kelangsungan hidup berbangsa. Persoalan ini adalah persoalan mendasar dalam sebuah negara jika saja potensi budaya, sumber daya manusia dan potensi alam yang ada tidak tergarap secara baik dari keegoan pemerintah justru akan merugikan negara itu sendiri. Karena tujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan sulit tercapai.

Oleh sebab itu aparaturnya daerah di harapkan di sela-sela menjalankan tugas publik service, development dan decetion making di harapkan dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat dengan senantiasa memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan (*organizing kearning*) pada masyarakat. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di indonesia dapat di lihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan ilmiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendah nya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Sehingga menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di indonesia. Upaya untuk

menanggulangi harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional, sedangkan sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik. Bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat salah satunya di gunakan untuk penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendes No. 04 Tahun 2015 pasal 2 Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi Desa” adalah Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yg kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti :

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat , listrik Desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum,

dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat Desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang.

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa. Untuk itu, masyarakat Desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua

fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik Desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat Desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di peDesaan. Peran pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas Desa yang lebih berdaya.

Keberadaan BUMDes adalah amanah dari Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014. Undang Undang Desa, ini menjadi payung hukum bagi pendirian BUMDes sebagai pelaku ekonomi untuk mengelola potensi desa secara kolektif guna meningkatkan kesejahteraan desa dan warganya. Sebelum lahirnya UU Desa, istilah BUMDes ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No72 Tahun 2005 dan rinciannya teknisnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010. Namun sampai saat ini, hanya sedikit desa di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi mampu mendirikan BUMDes. Walaupun ada desa yang menjalankan dengan prinsip dan tujuannya sama, namun nama kegiatan/usahnya berbeda-beda. Misalnya, seperti di daerah kita Kabupaten Pelalawan melalui UED/K - SP, namun dengan berdirinya BUMDes nanti, UED/K - SP dapat menjadi bagian dari usaha BUMDes. Badan usaha milik desa (BUMDes)

merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik mandiri yang tangguh yang memiliki dasar pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Adanya surat permintaan kabupaten tentang hasil evaluasi dan surat pelepasan manajemen program dari propinsi.
- b. Adanya surat dari propinsi riau yang menyatakan desa tersebut telah di evaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakan usaha ekonomi desa- simpan pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan mandiri serta di nyatakan siap untuk di lepas menjadi BUMDes.
- c. Berdasarkan poin 2 di atas maka pemerintah Kabupaten Pelalawan menyurati desa bersangkutan agar melaksanakan musyawarah pembentukan BUMDes.

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisaris dan pelaksana operasional atau direksi. Penasihat atau komisaris dijabat oleh Kepala Desa dan Pelaksana operasional atau direksi terdiri dari direktur dan kepala unit usaha. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Penasihat /komisaris, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana

operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. Selain memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, penasehat juga memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Pelaksana Operasional/Direksi, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan badan usaha milik desa tersebut komisaris dan pelaksana operasional di haruskan berkoordinasi guna terlaksananya badan usaha milik desa tersebut. Koordinasi yang dapat di lakukan oleh komisaris dan pelaksana operasional di antara nya adalah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang di lakukan minimal 4 (empat) bulan sekali yang melibatkan kepala desa selaku komisaris, pelaksana operasional selaku pengelola BUMDes, Kepala Dusun, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat, yang mana Rapat koordinasi ini membahas tentang perkembangan dari semua unit usaha yang terdapat di Bumdes tersebut. Selain itu rapat koordinasi rutin minimal sebulan sekali juga di lakukan oleh intern BUMDes.

Berdasarkan tugas kepala unit usaha pada ADART pasal 13 ayat 1 huruf a yaitu mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat. Kemudian ini juga selaras dengan apa yang dinyatakan dalam petunjuk pedoman pembinaan yaitu 1. Pemberian bimbingan, 2. Supervisi, 3. Konsultasi pelaksanaan urusan. (miftah toha, 2010:207).

Oleh sebab itu kepada setiap pengelola BUMDES seharusnya dapat memberikan suatu bimbingan kepada setiap masyarakat pemimjam dana yaitu baik berupa arahan maupun pentunjuk untuk penggunaan dana, agar dapat mengembangkan usahanya bukan hanya dalam bidang pertanian (berkebun) melainkan dalam bidang usaha lainnya (berdagang). Berikut ini adalah nama-nama desa di kecamatan Ukui yang sudah memiliki BUMDes :

Tabel 1.1 Nama-Nama Kelurahan/Desa Di Kecamatan Ukui yang sudah memiliki BUMDes.

NO	Nama Kelurahan/Desa	Nama BUMDes
1.	Desa Air Emas	Bina Sejahtera
2.	Desa Air Hitam	-
3.	Desa Bukit Gajah	Sumber Rezeky
4.	Desa Lubuk Kembang Sari	Fhatonah
5.	Desa Bukit Jaya	Usaha Mandiri
6.	Desa Bukit Kampung Baru	-
7.	Desa Lubuk Kembang Bunga	-
8.	Desa Silikuan Hulu	-
9.	Desa Tri Mulya Jaya	Bina Usaha
10.	Kelurahan Ukui I	Sumber Makmur
11.	Desa Ukui II	-

Sumber: Kantor BUMDes Fhatonah

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa beberapa Kelurahan/Desa di Kecamatan Ukui Sudah Memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Lubuk Kembang Sari di karenakan BUMDes di Desa Lubuk Kembang Sari memiliki aset yang dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu yang ada Di Desa tersebut.

Desa Lubuk Kembang Sari adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan Desa ini sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam atau Usaha jasa keuangan dan usaha sejenis lainnya. BUMDes di Desa Lubuk Kembang Sari ini di beri nama BUMDes Fhatonah.

Desa Lubuk Kembang Sari adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan Desa ini sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam atau Usaha jasa keuangan dan usaha sejenis lainnya. BUMDes di Desa Lubuk Kembang Sari ini di beri nama BUMDes Fathonah.

BUMDes Fathonah didirikan pada tanggal 24 oktober tahun 2015, yang berkedudukan dan berkantor di Desa Lubuk Kembang Sari. Adapun maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa Fathonah dimaksudkan untuk mendirikan Badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, selain itu tujuan pembentukannya juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Fathonah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan

kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Sementara itu, bidang usaha yang menjadi prioritas dari Badan Usaha Milik Desa Fathonah adalah :

1. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan
2. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa
3. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

Adapun untuk modal dasar yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fathonah sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari kantor Pemerintahan Desa Lubuk Kembang Sari yaitu berasal dari :

1. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.
2. Laba Usaha dari Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
3. Swadaya masyarakat.
4. Laba Usaha dari Dana Swadaya Masyarakat.
5. Bantuan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fhatonah Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa unit usaha yang di kelola oleh BUMDes tersebut yaitu:

1. Unit simpan pinjam

Unit Simpan Pinjam yang sumber Modalnya dari Modal Desa dan Simpanan dari masyarakat. unit yang Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa yang dinilai produktif,

tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa, Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah dan Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa.

2. Unit Dagang

Unit dagang adalah Unit Usaha yang bergerak di bidang Perkreditan Barang (Elektronik, Perabot, dll).

Berikut ini adalah tabel pinjaman modal kerja masyarakat pada unit simpan pinjam di BUMDes Fhatonah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.2 Pinjaman modal kerja di BUMDes Fhatonah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis usaha	Orang	Rupiah	Ket
1	Perdagangan	109	Rp 1.055.000.000,-	-
2	Pertanian	0	Rp 0,-	-
3	Perkebunan	193	Rp 1.799.870.000,-	-
4	Perikanan	4	Rp 40.000.000,-	-
5	Peternakan	1	Rp 15.000.000,-	-
6	Industri Kecil	0	Rp 0,-	-
7	Jasa	15	Rp 167.000.000,-	-
Jumlah		322	Rp 3.076.875.000	-

Sumber : Kantor BUMDes Desa Lubuk Kembang Sari tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat data terkait peminjaman yang telah diberikan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat sebagai nasabah, masyarakat mendapatkan peminjaman dana usaha apabila memenuhi persyaratan berupa proposal usulan yang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan kredit
 - a. Fc. KTP
 - b. Pas Photo 2x3
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Fc. Anggunan
2. Mengisi formulir permohonan kredit
3. Pernyataan kesanggupan pembayaran hutang
4. Surat kuasa penjualan anggunan
5. Surat penyerahan anggunan
6. Kwitansi
7. Surat perjanjian pemberian kredit (SP2K).

Berdasarkan data yang telah penulis sajikan pada tabel 1.2, dapat dilihat jumlah nasabah yang melakukan peminjaman dan juga jumlah dana yang di pinjam pada masing-masing jenis pinjamannya, dan untuk mengetahui perihal permasalahan yang di hadapi oleh pengurus BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, maka penulis akan menyajikan tabel di bawah ini yang memaparkan terkait dengan jumlah tunggakan yang ada di BUMDes Fathonah:

Tabel 1.3 Data pinjaman yang bermasalah pada BUMDes Fhatonah Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Permasalahan	Jumlah (Orang)	Keterangan (Total)
1	Jumlah Nasabah Pinjaman Lunas	203	Total, 322 Nasabah
2	Pinjaman Belum Lunas	119	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-Laki : 244 Orang • Perempuan: 78 Orang
3	Total Nasabah Melakukan Penunggakan Biasa.	65	Rp 266.410.778
4	Total Nasabah Dengan Tunggakan Jatuh Tempo Tanpa Kabar.	54	Rp 186.714.000
Total Kredit Macet			Rp 453.124.778

Sumber : Kantor Bumdes Fhatonah Desa Lubuk Kembang Sari 2018

Berdasarkan data yang penulis sajikan di atas, dapat di lihat bahwa jumlah nasabah yang melakukan penunggakan itu adalah berjumlah sebanyak 119 orang nasabah dengan nilai tunggakan yang di hasilkan adalah Rp 453.124.778,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juga Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), hal ini tentunya menjadi permasalahan yang nantinya dapat menghambat perkembangan dari BUMDes Fathonah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan, penulis menemukan permasalahan yaitu proses penyaluran dana dari BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari tidak disalurkan sebagaimana seharusnya membantu masyarakat dengan ekonomi tingkat bawah, hal ini bisa dibuktikan dari tabel 1.2 yang menggambarkan bahwa mayoritas peminjam dana adalah masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah ke atas yang telah memiliki perkebunan kelapa sawit dan juga masyarakat dengan usaha perdagangan yang sudah mandiri.
2. Banyak nasabah BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari yang melakukan penunggakan kredit, hal ini tentunya dapat mengganggu roda organisasi dari Badan Usaha Miliki Desa tersebut. Dimana salah satu penyebab penunggakan yang terjadi di sebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak berkembang, sehingga modal pinjaman yang didapatkan tidak dapat menghasilkan dan menjadi modal mati yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat yang di hadapi dalam Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahuifaktor penghambat dari Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu Pemerintah khususnya Ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang Administrasi Publik.

c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa & Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan-permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, dan adapun konsep-konsepnya antara lain sebagai berikut :

1. Pengertian Administrasi

Menurut Atmosudirjo (Syafiie 2006,13) administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya organisasi itu terdapat didalam suatu organisasi.

Menurut Zulkifli (2009;8) administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama manusia dalam organisasi untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.

Menurut Siagian (2008; 2) administrasi di definisikan sebagai kerja sama antara dua manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Faried Ali (2011; 23) administrasi adalah kerja sama yang di dasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam

mencapai tujuan bersama. Eksistensi manusia di landasi oleh moral dengan melibatkan sejumlah peralatan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan. Manusia pada hakikatnya menghendaki keteraturan baik dalam konteks potensional maupun dalam konteks normative ideal. Selanjutnya The Liang Gie (Syafiie 2006:14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama dalam pencapaian tujuan tertentu.

Dapat di simpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan aktifitas kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama. Zulkifli (2009;57) mengemukakan bahwa administrasi Negara sebagai keseluruhan aktifitas yang di rancang dan di laksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan ideal dan substansional yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Siagian (2008;7) keseluruhan kegiatan yang di lakukan oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha pencapaian tujuan Negara. Jadi intinya Administrasi Negara merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Pengertian organisasi

Dalam pelaksanaan Administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat dimana Administrasi di jalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Adminitrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya adminitrasi di dalam sebuah organisasi, maka tujuan organisasi tersebut akan sulit untuk di capai secara efektif dan efisien.

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang di integrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya terikat dalam hubungan terhadap keseluruhan. Organisasi di artikan menggambarkan pola-pola, sema, bagan, yang menunjukkan garis-garis pemerintahan, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya wadah atau tempat manager melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Menurut Griffin (2002;23) organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau dengan bahasa lain penulis mendefinisikan organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan nya tersebut melalui kerja sama.

Menurut siagian (2006;6) mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/ beberapa orang yang di sebut atasan dan seseorang yang di sebut bawahan.

Menurut hasibuan (2012;5) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen tersebut ialah:

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama
3. Tujuan bersama

Dalam organisasi amat di perlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi bertumbuh dan berkembang. Prinsip organisasi yang di maksud adalah :

1. *Organisasi dan tujuan* : prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan.
2. *Esensi organisasi* : prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual.
3. *Tanggung jawab dan otoritas* : prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang memberikan tanggung jawab harus juga di beri otoritas untuk melaksanakan suatu yang di perlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka.
4. *Spesialisasi untuk efisiensi* : organisasi yang efektif membagi tanggung jawab sehingga mengadakan spesialisasi dalam menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.
5. *Rentang kendali* : rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi di jalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien.

3. Konsep manajemen

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasinya. Ilmu dan strategi

terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendaya gunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang di tentukan sebelumnya.

Menurut Mary Parker Follet,1997 (dalam Sule,2010;5) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Segala sesuatu yang perlu di lakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Tujuan tersebut sangat beragam, tergantung dari jenis sebuah organisasi.

Nickels, McHugh and McHugh,1997(dalam Sule,2010;6) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Menurut malayu (2012;1) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen yaitu :

1. Adanya kerja sama anatar sekelompok orang dalam ikatan formal.
2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang akan di capai bersama.
3. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan di kerjakan,

Brantas (2009;4) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu sekelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional.

Samsudin (2010;15) mengemukakan manajemen yaitu bekerja dengan orang-orang mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia dan kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).

Siagian (2008;5) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen mempunyai dua tugas utama yaitu (1) Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak di capai. (2) Menentukan kebijakan umum yang meningkat organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Atau bagaimana menurut Griffin sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian, dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dari definisi- definisi di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk tujuannya, organisasi di buat berdasarkan berbagai visi untuk kebutuhan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya maka di kelola dan di urus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai maka di butuhkan ilmu, metode pendekatan pengelolaan sumber daya manusia atau sering di sebut dengan Manajemen SDM.

Penduduk indonesia yang merupakan jumlah terbesar ke empat di dunia merupakan modal besar pembangunan yang cukup strategis. Tetapi efektifitas dari jumlah yang besar tersebut akan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan dirinya sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Lebih dari itu, akan di ukur pula dari sejauh mana kemampuannya untuk berkompetisi dengan negara-negara lain agar tidak ketinggalan oleh perkembangan yang makin lama semakin meningkat. Ini berarti bahwa sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen (management service) yang mengacu kepada fungsi manajemen yang dalam pelaksanaanya meliputi proses-proses perencanaan, pengorganisasia, memimpin dan mengendalikan.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada sebuah organisasi, karna manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari manusia.

Pengertian Manajemen sumber daya manusia banyak di kemukakan oleh para ahli manajemen. Menurut Samsudin (2010;22) manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

Manajemen sumber daya adalah penerapan manajemen. Berdasarkan fungsi nya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi organisasi atau bisnis yang di jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat di pelihara dan tetap berkerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstanatau pun bertambah.

Manajemen sumber daya yang efektif yang mengharuskan manajer menemukan cara terbaik dalam memperkerjakan orang-orang atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Empat hal penting yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan.
2. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen keseluruhan.
3. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan.
4. Terdapat eksentuasi pada komitmen untuk malatih para manajer agar dapat berperan aktif sebagai penggerak dan fasilitator.

Menurut Malayu (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedarmayanti (2011;13) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan potensi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

Kesimpulan dari definisi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengadaan, pengembangan potensi sumber daya manusia, pemberian balas jasa sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

5. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan

kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat fiedrich (dalam Wibawa 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau

kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Soebakti (dalam Wibawa 2011:190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut Heinz Ewlu dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008 ; 6) adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konstitusi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengaatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai denga bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho,2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004 :31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hokum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi Negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan ntuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Abidin,2004:21).

Aderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoala tertentu yang sedang dihadapi.Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Aderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria. Berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abiin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Koryati (2005:2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

6. Konsep Evaluasi

Nurcholis (2005:67) menyatakan Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *input, proses, outputs, dan outcomes* melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Menurut tangkilisan (2003:28), walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yakni indikator *input, proses, outputs, dan outcomes*. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator *input* ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Efektivitas menurut Dunn (2000:610) dalam pengevaluasiannya harus bisa menjawab apakah asil yang diinginkan telah dicapai, dimana efektivitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas lebih melihat kepada hasil/ tujuan yang hendak dicapai sedangkan efisiensi melihat kepada berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Nurcholis (2005:67) indikator *outputs*(hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang tercover dalam kebijakan tertentu, Demikian seterusnya. Dan terakhir indikator *outcomes*(dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Siagian (2003:17) memberikan batasan penilaian (evaluasi) sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut ndraha adalah :

- a) Model *befora-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;
- b) Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya;
- c) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan).

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya. Suchman (dalam Winarno, 2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Dunn (2003:608) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Menurut Dunn (1999:608) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

Menurut Ndraha (2003:201) juga menyatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

7. Tugas dan Fungsi

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006;25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labobo, 2006 :26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan

pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

8. Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat 1).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat 2).

Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat 3).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari undang-undang Tentang Desa yang baru.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015 Pemerintahan Desa Pekanbaru antara lain :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan;
- m. Dan keberlanjutan;

Menurut Sufian (2003 : 23) menyatakan bahwa desa yang merupakan bagian wilayah Kabupaten/kota yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah desa yang mampu menyelenggarakan pembangunan atas dasar kemampuan keuangan sendiri.

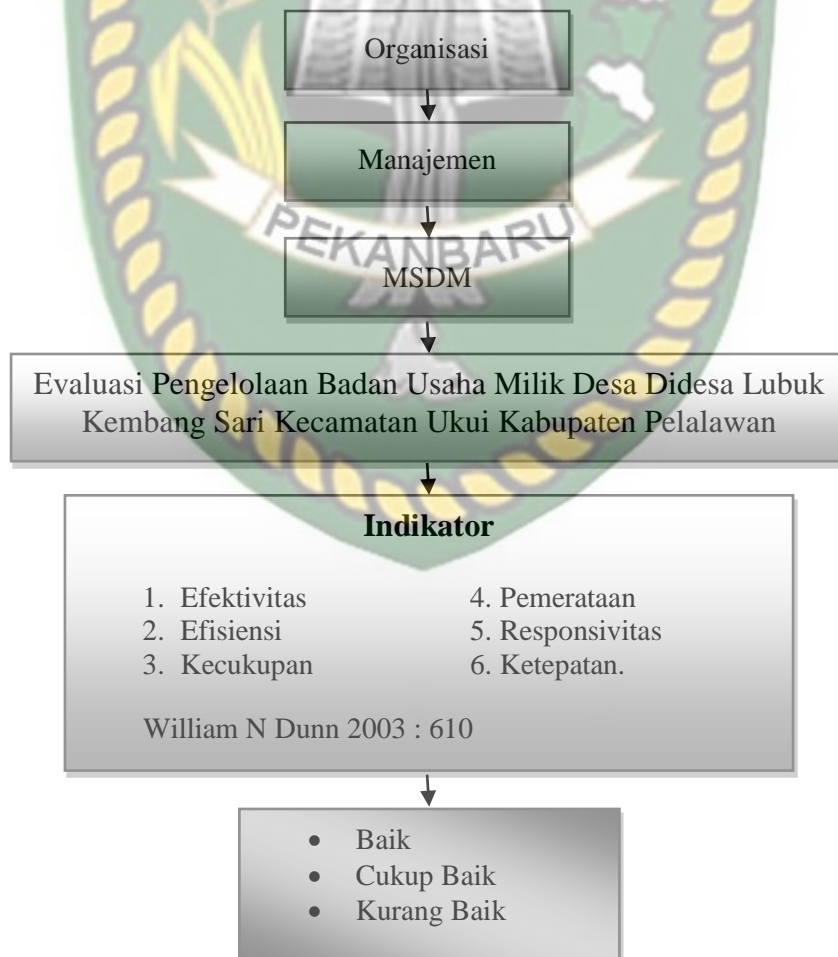
Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil (Nuecholis, 2011 : 76).

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan koordinasi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa (2003:23).

B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan konsep penelitian yang sedang di teliti. Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui berkaitan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, hal tersebut akan menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini, adapun kerangka pikirnya adalah sebagai berikut:

Gambar II. I Kerangka Pikiran Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Olahan Penulis 2019

C. Konsep Operasional

Untuk dapat memberikan penjelasan mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan mengenai konsep operasional:

1. Administrasi adalah kerjasama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral dan etika dalam mencapai tujuan.
2. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pegasarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan – tujuan organisasional.
4. Manajemen sumberdaya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.
5. Kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan atau kesempatan – kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.
6. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

7. Fungsi pemerintah adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.
10. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public
11. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dalam penyelenggaraan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
12. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
13. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
14. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
15. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

D. Operasional Variabel

Tabel II. 1 : Operasionalisasi Penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public Menurut William N Dunn (201:608)	Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	1. Efektivitas	a. Menjalankan Program yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. b. Melaksanakan Proses Sosialisasi Terkait Program BUMDes.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Proses Pembayaran Kredit Lancar. b. Kemudahan Persyaratan Pinjaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Memberikan pembinaan dan pelatihan kerja kepada nasabah. c. Tercapainya Target Program BUMDes.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		4. Pemerataan	a. Pengurus bersikap adil dalam menyalurkan dana pinjaman BUMDes. c. Mengutamakan Masyarakat Ekonomi Bawah.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		5. Responsivitas	b. Profesionalisme SDM (Pengelola) BUMDes. b. Pembatasan pinjaman bagi masyarakat mampu.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		6. Ketepatan	a. Pelaksanaan Pengawasan terhadap nasabah BUMDes. b. Memiliki Manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Sumber : Olahan Penulis, 2018

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel dan indikator penelitian adalah menggunakan teknik Skala Likert, dimana untuk mendapatkan hasil konversi data responden, maka peneliti merumuskan analisis Skala Likert, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan teori dari Hartono (2006:30). Dalam teorinya dikatakan bahwa Sekala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yaitu, penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi tiga kriteria yaitu: Baik, Cukup Baik, Kurang Baik. Untuk melihat lengkapnya, dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini :

- Baik : Apabila semua indikator Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berkisar 67%-100%.
- Cukup Baik : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berkisar dengan 33%-66%.
- Kurang Baik : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berkisar berkisar 1%-33%.

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

- Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Efektivitas dengan jawaban berkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Efektivitas dengan jawaban berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Efektivitas dengan jawaban berkisar 1% - 33%.

2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Efisiensi dengan jawaban berkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Efisiensi dengan jawaban berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Efisiensi dengan jawaban berkisar 1% - 33%.

3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Kecukupan dengan jawaban berkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Kecukupan dengan jawaban berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Kecukupan dengan jawaban berkisar 1% - 33%.

4. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Pemerataan dengan jawaban berkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Pemerataan dengan jawaban berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Pemerataan dengan jawaban berkisar 1% - 33%.

5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Responsivitas dengan jawaban berkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Responsivitas dengan jawaban berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Responsivitas dengan jawaban berkisar 1% - 33%.

6. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Ketepatan dengan jawaban berkisar 67 % - 100%.

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Ketepatan dengan jawaban berkisar 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase dari jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang Ketepatan dengan jawaban berkisar 1% - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:5) metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data dan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data Kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, adapun alasan penulis memiliki lokasi tersebut dikarenakan penulis Tertarik bahwasanya Di Desa Lubuk Kembang sari memiliki usaha yang merupakan Badan Usaha Milik Desa dimana usaha tersebut memiliki aset yang dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu yang ada di desa lubuk kembang sari Kecamatan Ukui Kabuapten Pelalawan. Tetapi pada fenomenanya dilapangan, penulis menduga bahwa ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak maksimalnya fungsi dari BUMDes

tersebut, dengan demikian maka penulis tertarik mengangkat judul tentang Evaluasi Pengelolaan BUMDes di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sedangkan menurut Mukhtar, (2013;93) Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran penelitian. Dari keseluruhan populasi yang luas, maka di batasi dari sebagian dari populasi tersebut yang dikenal populasi target.

2. Sampel

Menurut Mukhtar (2013;93) sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Bapak M. Iwan Kusmawan, Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag, Direktur BUMDesa Fathonah Bapak Sujarwana. Nasabah BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari. Untuk lebih detailnya masalah populasi dan sampel ini, dapat di lihat pada tabel di bawah :

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Di Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah. Bapak M. Iwan Kusmawan	1	1	100%
2	Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag	1	1	100%
3	Direktur BUMDesa Fathonah. Bapak Sujarwana.	1	1	100%
4	Nasabah BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari.	322	76	24%
	Jumlah	325	79	24%

Sumber : Kantor BUMDes Lubuk Kembang Sari 2019

Jumlah populasi untuk Nasabah BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah 322 orang, penelitian ini menggunakan metode slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n : Sampel

N : Populasi

d : Besarnya tingkat kesalahan

1 : Konstan

$$n = \frac{322}{1+322(0.1)^2}$$

$$n = \frac{322}{4.22}$$

$$n = \frac{322}{1+322(0.01)}$$

$$n = 76 \text{ Sampel}$$

$$n = \frac{322}{1+3.22}$$

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini, untuk perangkat desa dan kepala desa penulis menggunakan teknik *sensus* sedangkan masyarakat menggunakan *purposive sampling* didalam penentuan sampel/ dimaksudkan agar penulis dapat menyederhanakan penelitian hanya terhadap sampel tertentu saja yang dianggap mengetahui dan lebih memahami permasalahan yang diteliti. Namun penulis mengusahakan sampel penelitian dapat mewakili dari populasi sehingga data yang diperoleh dari responden lebih valid.

A. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang pelaksanaan koordinasi kepala Desa dengan pengelola BUMDes dalam pengelolaan BUMDes di Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan dari masalah yang di teliti. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi atas data primer dan dapat juga berupa :

- a. Keadaan Geografis
- b. Keadaan Penduduk
- c. Ekonomi/ Mata Pencaharian
- d. Sosial Budaya

Data sekunder yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek pada penelitian ini. Dalam penelitian data sekunder penulis dapatkan dari internet dan skripsi-skripsi pendukung (Rumidi 2004;65).

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Quisioner yaitu teknik pengumpulan data yang memuat daftar pertanyaan (angket) yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- d. Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode kuantitatif secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian kemudian dianalisa selanjutnya diambil kesimpulan.

Menurut Patton (dalam Moleong, 2005;280) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ini dapat dibedakan dengan penafsiran yaitu membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor Tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah Pelalawan

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu

Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara $1^{\circ}25''$ LU dan $0^{\circ},20''$ LS serta antara $100^{\circ},42'' \sim 103^{\circ},28''$ BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Merati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2016 sebanyak 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%).

B. Profil Desa Lubuk Kembang Sari.

Desa Lubuk Kembang Sari merupakan salah satu dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan salah satu desa eks transmigrasi. Pada tahun 1988 desa ini adalah merupakan unit pemukiman transmigrasi UPT IV, Satuan Permukiman (SP) V, atau lebih dikenal dengan SP 5, Definitif pada tahun 1992 dengan SK Bupati Kampar.

Kondisi masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari begitu heterogen, mulai suku melayu, suku jawa, suku minang, suku batak, suku sunda, suku nias dan suku-suku lainnya ada di Desa Lubuk Kembang Sari. Dengan beraneka pemeluk

agama, budaya, dan adat istiadatnya dan berdomisili di Desa Lubuk Kembang Sari. Untuk itu diperlukan pola-pola tertentu dalam rangka peningkatan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa yang selama ini di upayakan secara terus menerus di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Seiring dengan perkembangan jaman dan arus reformasi yang menuntut perluasan otonomi daerah, maka tugas dan fungsi organisasi pemerintahan Desa lebih disesuaikan dengan kondisi Desa yang mengarah kepada pelayanan publik. Dari konsep pemikiran tersebut, maka disusunlah organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten pelalawan.

Desa Lubuk Kembang Sari, mempunyai luas wilayah 1.980,5 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 2,768 jiwa pada tahun 2017, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.442 jiwa dan perempuan sebanyak 1.326 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Bukit Jaya
Sebelah Timur	: Desa Ukui 2
Sebelah Selatan	: Desa Silikuan Hulu
Sebelah Barat	: Desa Air Hitam.

Adapun jumlah pemerintaha Desa yang ada di Desa Lubuk Kembang Sari adalah sebagai berikut:

- Jumlah Dusun : 3 Dusun
- Jumlah RW : 4 RW
- Jumlah RT : 23 RT
- Iklim : Tropis Dengan Hujan Sepanjang Tahun.
- Tofografi : Dataran Sedang
- Tinggi Daratan : 20 Meter Dari Permukaan Laut Dengan Suhu 27 C

C. Profil Badan Usaha Milik Desa (Fathonah) Desa Lubuk Kembang Sari.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Fathonah) Desa Lubuk Kembang Sari didirikan pada tanggal 24 Oktober 2015, dimana kantor utama BUMDesa ini berada di Kantor Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Fathonah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Fathonah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja. Dimana bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Fathonah adalah :

- a. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan
- b. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa
- c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

Dalam menjalankan roda organisasinya, Badan Usaha Milik Desa Fathonah di Desa Lubuk Kembang Sari adalah:

- a. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.
- b. Laba Usaha dari Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
- c. Swadaya masyarakat.
- d. Laba Usaha dari Dana Swadaya Masyarakat.
- e. Bantuan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat.

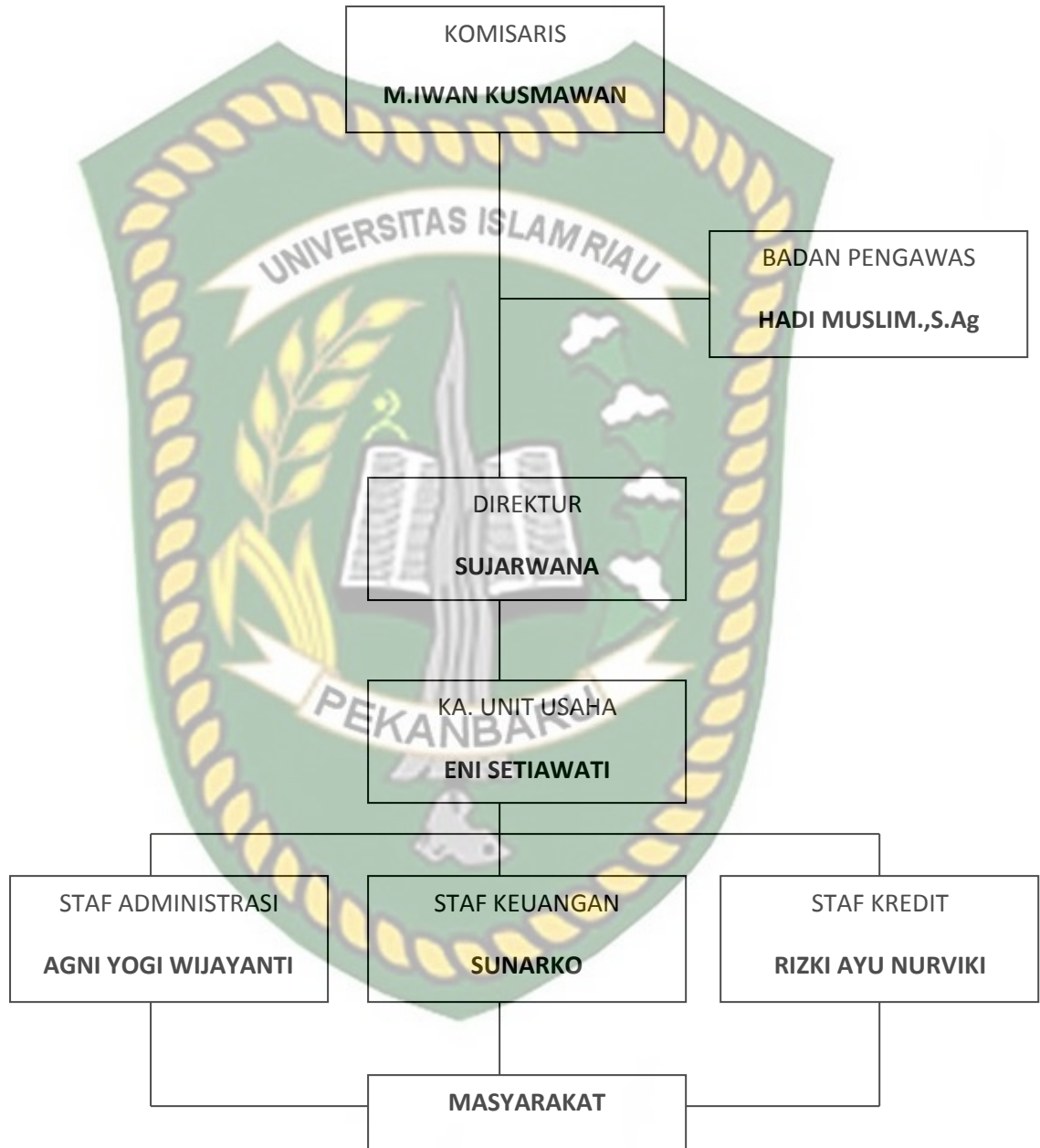
D. Struktur Organisasi

Menurut Permendes No. 04 Tahun 2015 Pasal 2 Pendirian BUMDes di maksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang di kelola oleh desa dan/ atau kerja sama antar desa. Maka Struktur Organisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Komisaris
2. Badan Pengawas
3. Direktur
4. Kepala Unit Usaha
5. Staf Administrasi
6. Staf Keuangan
7. Staf Kredit
8. Masyarakat



IV.1 Gambar Bagan :
Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Keberhasilan sebuah penelitian sangat bergantung pada sampel yang menjadi sumber data yang ada di lapangan, karena di dalam proses penelitian ini harus mengetahui jumlah, jenis atau golongan sampel ataupun dapat dikatakan dengan identitas sampel. Terkait permasalahan dalam penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, jadi data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber pihak yang berwenang dalam menjalankan BUMDes, yaitu Kepala Desa Lubuk Kembang Sari (Komisaris/Penasehat), Ketua BPD, dan Direktur BUMDes dengan cara melakukan wawancara, dan juga menyebarkan kuesioner pada Nasabah BUMDes berjumlah 76 orang sampel.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang di sajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Nasabah BUMDes

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	46	61%
2	Perempuan	30	39%
Jumlah		76	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa Nasabah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 46 orang dengan persentase 61%, sedangkan pada nasabah yang memiliki jenis kelamin perempuan dengan jumlah 30 orang dengan persentase 39% dari total keseluruhan jumlah responden nasabah 76 sampel.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya tentu sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Nasabah BUMDes

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	25	33%
3	41-50 Tahun	40	53%
4	>50 Tahun	11	14%
Jumlah		76	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari Nasabah BUMDes, responden yang paling banyak, usia 41-50 Tahun sebanyak 53 orang dengan persentase (53%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 25 orang dengan persentase (33%), sedangkan usia paling minim adalah >50 berjumlah 11 orang (14%). Hal ini dikarenakan umur pada interval 41-50 Tahun adalah responden yang memiliki usaha dan mengembangkannya dengan cara meminjam ke BUMDes.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden memiliki pendidikan SMA. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil

penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Nasabah BUMDes

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	50	66%
4	Diploma	11	14%
5	Sarjana S1/S2	15	20%
Jumlah		76	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Nasabah BUMDes yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 50 orang dengan persentase (60%), responden yang memiliki pendidikan SMP berjumlah 6 orang (30%), sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan SD yaitu berjumlah 2 orang (10%). Hal ini dikarenakan bahwa pada di lapangan dapat penulis menjumpai nasabah yang dijadikan responden dengan pendidikan terakhir SMA, dan mereka memiliki usaha berkebun, berdagang, dan sebagainya.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Pada penelitian terkait Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelawan ini dapat diukur dengan beberapa berdasarkan teori dari Dunn (2003:610). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) evektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Jadi efektivitas merupakan pencapain hasil yang dilakukan seseorang. Dapat dikatakan efektif jika pekerjaannya tepat pada waktu, biaya, serta kualitasnya.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Menjalankan Program yang Bertujuan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, dan Melaksanakan Proses Sosialisasi Terkait Program BUMDes.

Tabel V.4 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah terhadap Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menjalankan Program yang Bertujuan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	18 (24%)	31 (41%)	27 (49%)	76 (100%)
2	Melaksanakan Proses Sosialisasi Terkait Program BUMDes	15 (20%)	29 (38%)	32 (42%)	76 (100%)
Jumlah		33	60	59	152
Rata-Rata		17	30	29	76
Persentase		22%	40%	38%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Nasabah yang ada pada kategori “Baik” adalah sebanyak 17 orang responden (22%), adapun alasan yang diberikan oleh responden untuk jawaban ini adalah, bahwa pihak BUMDes Fathonah sudah menjankan program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, serta sudah melaksanakan proses sosialisasi terkait program BUMDes.

Dan jawaban selanjutnya yang diberikan oleh responden adalah jawaban ‘Cukup Baik” dimana jumlah responden yang memberikan jawaban untuk kategori ini

adalah sebanyak 30 responden (40%), adapun alasan yang diberikan responden terhadap jawaban ini yaitu mengatakan bahwa memang pihak BUMDes sudah menjalankan program yang sudah direncanakan, tetapi dari beberapa program yang terencana hanya 1 program yang dijalankan yaitu program simpan-pinjam, dan terkait dengan pemberian sosialisasi yang diberikan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat, memang pernah dilakukan tetapi hanya sekali yaitu pada saat BUMDes baru ingin dilaksanakan.

Sementara untuk responden nasabah BUMDes Fathonah yang memberikan jawaban pada kategori “Kurang Baik” berjumlah sebanyak 29 Orang responden (38%), jawaban ini tentunya memiliki alasan yang diberikan oleh responden tersebut, dimana alasannya adalah mereka merasa program BUMDes yang dilaksanakan tidak semua sesuai dengan tujuannya.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang berasal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah yaitu Bapak M. Iwan Kusmawan, selanjutnya adalah Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) yaitu Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dan informan yang terakhir adalah Direktur BUMDesa Fathonah yaitu Bapak Sujarwana. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, dimana untuk tanggapan pertama di berikan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentunya program BUMDesa ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu tingkat perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari, sudah banyak masyarakat yang tingkat ekonominya naik karna bantuan permodalan untuk usaha yang di jalani, terlebih mereka yang memang memiliki usaha tetapi tidak punya modal untuk meningkatkan usaha tersebut, contohnya seperti perkebunan sawit, mereka punya kebun itu, tp tidak punya uang untuk beli pupuk nya, dan disinilah peran dari BUMDesa, diberikan pinjaman dan dibayar dengan mencicil dimana tentunya bunga yang ringan”. (Wawancara 8 Januari 2019, M. Iwan Kusmawan, Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari)

Pembahasan selanjutnya adalah penyajian hasil wawancara yang diberikan oleh informan penulis yaitu Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dimana beliau bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes Fathonah tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Bermanfaat, dan program ini suda kita lakukan sosialisasi dari pertama kali di luncurkan di Desa Lubuk Kembang Sari, dan itu melibatkan aparat-aparat terkait, baik dari kabupaten dan juga kecamatan, hingga pihak Kepolisian hadir dalam peluncuran program tersebut, dan masyarakat sangat antusias akan program ini”. (Wawancara, 9 Januari 2018, Hadi Muslim, S.Ag Ketua BPD, Pengawas BUMDesa Fathonah)

Untuk melengkapi jawaban di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak Sujarwana, dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator yang pertama adalah sebagai berikut:

“Sudah dilaksanakan, dan masyarakat juga sudah mengetahuinya, saya pastikan seluruh masyarakat Desa sudah mengetahui program ini, dan hampir semua Kepala Keluarga sudah pernah meminjam di BUMDes Fathonah, dan pastinya program ini sangat membantu perkembangan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan sosialisasi sudah berjalan cukup baik di Desa Lubuk Kembang Sari, dan masyarakat yang penulis temui sudah mengetahui terkait dengan program BUMDes tersebut, tetapi yang menjadi permasalahan dilapangan adalah program tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang peningkatan bantuan modal, hal ini dikarenakan masyarakat yang mendapatkan pinjaman di BUMDes Fathonah adalah masyarakat yang memang harus mempunyai angunan atau jaminan, sementara masyarakat yang sebenarnya butuh bantuan dan benar-benar tidak memiliki apa-apa, dan membutuhkan bantuan modal usaha, tidak dapat memanfaatkan program tersebut dikarenakan terkendala di angunan atau jaminan yang di tetapkan.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya alam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Jadi efisien adalah adalah suatu tolak ukur dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai hasil yang efektif, semua yang dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang ada dan mencukupi serta memadai untuk mencapai keberhasilan sebuah program.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Efisiensi” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Proses Pembayaran Kredit Lancar	15 (20%)	31 (41%)	30 (39%)	76 (100%)
2	Kemudahan Persyaratan Pinjaman	7 (9%)	33 (43%)	36 (48%)	76 (100%)
Jumlah		22	64	66	152
Rata-Rata		11	32	33	76
Persentase		14%	42%	44%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh responden Nasabah adalah sebagai berikut, dimana jawaban yang pertama adalah untuk kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 11 Orang (14%), adapun alasan responden memberikan jawaban ini adalah dikarenakan responden tersebut proses pembayaran yang mereka lakukan sudah lancar, dan mereka mendapatkan kemudahan persyaratan pinjaman.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban yang diberikan responden untuk kategori “Cukup Baik” dimana jumlah responden untuk kategori ini adalah sebanyak 32 Orang (42%). Adapun alasan yang diberikan oleh responden adalah mereka menilai bahwa pihak BUMDes sudah memberikan persyaratan dalam peminjaman uang sudah cukup mudah tetapi terkendala pada persyaratan yang harus ada anggungan, dan juga pada proses pembayaran kredit sedikit bermasalah.

Dan jawaban yang terakhir adalah pada kategori “Kurang Baik” berjumlah sebanyak 33 Orang responden (44%), dimana alasan untuk jawaban pada kategori ini responden mengatakan bahwa mereka terkendala dengan persyaratan pinjaman yang harus mewajibkan adanya anggunan.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang berasal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah yaitu Bapak M. Iwan Kusmawan, selanjutnya adalah Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) yaitu Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dan informan yang terakhir adalah Direktur BUMDesa Fathonah yaitu Bapak Sujarwana. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, dimana untuk tanggapan pertama di berikan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Permasalahannya memang ada di pembayaran kredit, laporan yang masuk ke saya memang memberikan data bahwa masih banyak nasabah yang melakukan penunggakan terhadap kredit mereka, alasannya juga bermacam-macam, mulai dari hasil panen yang kurang, harga penjualan yang merosot serta permasalahan lainnya, dan ini yang menjadi prioritas dari pengurus, terkadang memang menjadi dilema untuk memberikan persyaratan yang mudah, karna nantinya dengan kemudahan tersebut, semua akan melakukan pinjaman tetapi susah untuk melakukan pembayaran, karna terkadang usaha yang ingin di jalankan belum memiliki fisik yang kuat, sehingga hanya akan terlihat meyakinkan di awal-awal usaha saja.”. (Wawancara 8 Januari 2019, M. Iwan Kusmawan, Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari)

Pembahasan selanjutnya adalah penyajian hasil wawancara yang diberikan oleh informan penulis yaitu Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dimana beliau bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes Fathonah tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Persyaratan sudah sangat mudah memang, cukup KTP dan Domisili tetap di Desa Lubuk Kembang Sari saja, sudah bisa mendapatkan pinjaman di BUMDes Fathonah, dan memang yang menjadi masalah itu proses pembayaran yang terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang dilakukan, dan hal ini selalu saya pantau dan diskusikan kepada pengurus BUMDes Fathonah”. (Wawancara, 9 Januari 2018, Hadi Muslim, S.Ag Ketua BPD, Pengawas BUMDesa Fathonah)

Untuk melengkapi jawaban di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak Sujarwana, dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator yang pertama adalah sebagai berikut:

“Permasalahan pada umumnya yang muncul dari macet nya proses pembayaran kredit, hal ini berdampak dari penyaluran uang modal yang di pinjam dari BUMDes tidak memiliki manajemen yang baik, terkadang masyarakat meminjam itu bukan untuk modal usaha, tetapi untuk bayar keperluan lain, seperti uang sekolah anak nya, uang bayar cicilan motornya, dan hal-hal lainnya, sehingga uang yang dipinjam tadi tidak bisa di manfaatkan menjadi modal yang menguntungkan, melainkan menjadi yang mati”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, dimana penulis menemukan fakta bahwa memang pembayaran kredit macet di awali dengan proses pemanfaatan modal yang salah digunakan oleh nasabah, banyak nasabah yang memanfaatkan pinjaman modal untuk keperluan keluarga dari pada pengembangan modal usaha yang mereka jalankan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan cukup atau pas pada sumber daya seperti anggaran atau biaya, saran dan prasaranan, dan dukungan dari pihak terkait untuk menjalankan program yang telah ditetapkan. Dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N.Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke tiga yaitu indikator yang membahas tentang “Kecukupan” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan pembinaan dan pelatihan kerja kepada nasabah	21 (28%)	20 (26%)	35 (46%)	76 (100%)
2	Tercapainya target Program BUMDes	9 (12%)	30 (40%)	37 (48%)	76 (100%)
Jumlah		30	50	72	152
Rata-Rata		15	25	36	76
Persentase		20%	33%	47%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh responden Nasabah adalah sebagai berikut, dimana jawaban yang pertama adalah untuk kategori “Baik” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 21 Orang (28%), adapun alasan responen memberikan jawaban ini adalah bahwa pihak BUMDes sudah memberikan pembinaan dan pelatihan kerja kepada nasabah, dan menilai program BUMDes sudah tercapai.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban yang diberikan responden untuk kategori “Cukup Baik” dimana jumlah responden untuk kategori ini adalah sebanyak 25 (33%). Adapun alasan yang diberikan terkait dengan jawaban ini adalah dikarenakan bahwa pihak BUMDes sudah menjalankan programnya sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal.

Dan jawaban yang terakhir adalah pada kategori “Kurang Baik” berjumlah sebanyak 36 Orang responden (47%), dimana alasan untuk jawaban pada kategori ini responden mengatakan bahwa program yang sudah dilaksanakan belum mencapai target, karena yang bisa meminjam uang pada BUMDes adalah masyarakat atau nasabah yang memiliki anggunan dan cenderung masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang berasal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah yaitu Bapak M. Iwan Kusmawan, selanjutnya

adalah Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) yaitu Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dan informan yang terakhir adalah Direktur BUMDesa Fathonah yaitu Bapak Sujarwana. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, dimana untuk tanggapan pertama di berikan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Target dari BUMDes yang di programkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah untuk membantu masyarakat mengembangkan perekonomiannya secara optimal, dan target itu tidak susah sebenarnya, hanya saja bagaimana pengelolaan pinjaman tadi dapat di alokasikan kepada kebutuhan yang sepatutnya, dan saya rasa target tersebut sudah cukup berhasil, karna memang banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya pinjaman dana yang diberikan.”. (Wawancara 8 Januari 2019, M. Iwan Kusmawan, Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari)

Pembahasan selanjutnya adalah penyajian hasil wawancara yang diberikan oleh informan penulis yaitu Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dimana beliau bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes Fathonah tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Saya kira, pembinaan kepada masyarakat itu tidak bersifat langsung, pembinaan yang diberikan hanyalah pasif, dan cenderung memberikan saran saja, karna masyarakat itu beranggapan, apabila mereka meminjam uang, berarti mereka punya kebutuhan sendiri, dan punya tujuan untuk apa mereka meminjam uang tersebut, mereka tidak suka di campuri sampai kesana. Selama mereka mampu membayar kredit, mereka beranggapan itu sudah cukup ”. (Wawancara, 9 Januari 2018, Hadi Muslim, S.Ag Ketua BPD, Pengawas BUMDesa Fathonah)

Untuk melengkapi jawaban di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Fathonah Desa

Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak Sujarwana, dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator yang pertama adalah sebagai berikut:

“Prateknya memang belum berjalan untuk proses pembinaan ini, dimana hal-hal yang berkaitan dengan proses pemberian pelatihan dan pembinaan belum bisa kita laksanakan dikarenakan fasilitas dan juga SDM yang terbatas, disisi lain nya, masyarakat yang meminjam juga tidak semuanya mengalokasikan dana nya untuk modal usaha, contoh saja, mereka minjam dana dengan isi proposal untuk membuka warung, tetap faktanya dilapangan, mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli motor dan kebutuhan lainnya, jadi kendalanya ada di hal-hal seperti ini”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Sementara untuk jawaban yang diberikan oleh direktur BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak Sujarwana terkait dengan pertanyaan penulis tentang apakah sudah tercapai target dari BUMDes Fathonah, dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Sejauh ini saya rasa sudah cukup membantu masyarakat, perekonomian masyarakat cukup terbantu dengan adanya pengalokasian dana pinjaman dari BUMDes, bahkan saya sendiri juga terbantu dari financial dari kehadiran BUMDes ini sendiri, tentunya karna saya dapat pekerjaan”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, dimana penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan proses pelatihan terkait dengan upaya pengembangan usaha yang dijalankan masyarakat belum berjalan, hal ini dikarenakan pemanfaatan dana yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki sepenuhnya untuk menjalan usaha mereka, dana yang di pinjam cenderung di manfaatkan untuk keperluan lain seperti membeli fasilitas keluarga dan juga untuk kepentingan pendidikan keluarga mereka, sehingga pihak BUMDes hanya bisa memberikan himbauan saja kepada nasabahnya.

4. Pemerataan

Pemerataan dapat diartikan dengan sebuah keadilan dalam melakukan sesuatu kebijakan. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Jadi pemerataan berpatokan pada keadilan dan kewajaran.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengurus bersikap adil dan menyalurkan dana pinjaman BUMDes	16 (5%)	38 (70%)	22 (25%)	76 (100%)
2	Mengutamakan masyarakat ekonomi bawah	17 (5%)	28 (37%)	31 (41%)	76 (100%)
Jumlah		33	66	53	152
Rata-Rata		16	33	27	76
Persentase		21%	43%	36%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penyajian data yang terdapat pada tabel V.7 di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa jawaban yang diberikan responden untuk kategori “Baik” memiliki rata-rata sebanyak 16 responden dengan persentase mencapai (21%), adapun alasan yang diberikan responden terkait jawaban ini adalah

pengurus BUMDes sudah bersikap adil dan menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang melakukan simpan-pinjam.

Sementara untuk jawaban pada kategori “Cukup Baik”, responden yang memberikan jawaban untuk kategori ini berjumlah sebanyak 33 orang responden dengan persentase mencapai (43%), adapun alasan yang diberikan oleh responden untuk jawaban pada kategori ini adalah bahwa pengurus BUMDes Fathonah sudah cukup adil dalam memberikan pelayanan kepada nasabah atau masyarakat yang mau meminjam uang untuk modal usahanya. Tetapi untuk menyalurkan dana BUMDes untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, kurang optimal karena yang bisa meminjam adalah mereka yang memiliki anggaran, dan tidak semua masyarakat apalagi yang memiliki perekonomian ke bawa.

Dan untuk jawaban yang terakhir adalah jawaban pada kategori “Kurang Baik” dimana jumlah responden yang memberikan jawaban terhadap kategori ini memiliki rata-rata sebanyak 27 dengan persentase mencapai (36%). Alasan mereka memberikan tanggapan kurang baik terhadap sikap pengurus dalam menyalurkan dana belum secara adil karena masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan dana BUMDes Fathonah dan terkendala dengan persyaratan.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang berasal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah yaitu Bapak M. Iwan Kusmawan, selanjutnya adalah Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) yaitu Bapak Hadi Muslim,

S.Ag dan informan yang terakhir adalah Direktur BUMDesa Fathonah yaitu Bapak Sujarwana. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, dimana untuk tanggapan pertama di berikan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya rasa sudah sangat adil, karna memiliki aturannya tersendiri dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, tidak ada membeda-bedakan siapapun boleh mendapatkan dan memanfaatkan pinjaman dari BUMDes Fathonah ini.”. (Wawancara 8 Januari 2019, M. Iwan Kusmawan, Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari)

Pembahasan selanjutnya adalah penyajian hasil wawancara yang diberikan oleh informan penulis yaitu Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dimana beliau bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes Fathonah tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah, semua dilakukan dengan adil dan transparan tanpa ada yang di tutup-tutupi, saya sebagai pengawas memastikan hal itu, dan apabila memang syaratnya dipenuhi, siapapun bisa mendapatkan pinjaman dana tersebut, karna dana itu memang untuk masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari”. (Wawancara, 9 Januari 2018, Hadi Muslim, S.Ag Ketua BPD, Pengawas BUMDesa Fathonah)

Untuk melengkapi jawaban di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak Sujarwana, dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator yang pertama adalah sebagai berikut:

“Permasalahannya adalah niat dari masyarakat itu sendiri, terkadang kata adil ini memiliki dua arti, begini, kita bisa saja memberikan kemudahan kepada masyarakat kurang mampu, kita buat tanpa syarat, setelah itu kita lakukan, apakah nantinya masyarakat lain tidak ingin mendapatkan keringanan yang sama? Jadi ya kita sama kan saja, kita buat aturan persyaratan, siapapun yang bisa memenuhi persyaratan peminjaman dana tersebut, kita akan proses pencairannya, dengan catatan salah satu syarat nya ya warga asli Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, dimana penulis menemukan fakta bahwa prosedur yang ditetapkan oleh pengurus dan pemerintah desa untuk mendapatkan pinjaman memang harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan, dan siapapun masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, dapat meminjamnya, tanpa membeda-bedakan golongan dan tingkat perekonomiannya, tentunya dengan batasan pinjaman juga.

5. Responsivitas

Resonsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 2005:177). Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Profesionalisme SDM (Pengelola) BUMDes	17 (22%)	30 (39%)	29 (38%)	76 (100%)
2	Pembatasan Pinjaman bagi masyarakat mampu	19 (25%)	33 (43%)	24 (32%)	76 (100%)
Jumlah		36	63	53	152
Rata-Rata		18	31	27	76
Persentase		24%	41%	35%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator kelima yang membahas tentang “Responsivitas” dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata 18 orang responden (24%) yang memberikan jawaban pada pilihan kategori “Baik”. Adapun alasan dari nasabah memberikan tanggapan baik pada profesionalisme SDM (pengelola) BUMDes ini, bahwa mereka menilai pengurus sudah mengelola dengan professional dan baik karena hingga saat sekarang BUMDes masih ada dan masih bisa untuk meminjam.

Selanjutnya responden nasabah yang memberikan jawaban pada kategori “Cukup Baik” rata-rata berjumlah 31 Orang responden (41%), adapun alasan dari nasabah

memberikan tanggapan baik terhadap profesionalisme SDM pengurus, karena mereka sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan, dan sudah memiliki batasan kepada pinjaman masyarakat yang menjadi nasabahnya. Sementara untuk pilihan jawaban pada kategori “Kurang Baik”, rata-rata responden menjawab 27 orang responden (35%). Hal ini dikarenakan mereka menilai pihak BUMDes belum bisa Profesional dalam mengurus atau mengelola program simpan-pinjam BUMDes.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang berasal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah yaitu Bapak M. Iwan Kusmawan, selanjutnya adalah Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) yaitu Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dan informan yang terakhir adalah Direktur BUMDesa Fathonah yaitu Bapak Sujarwana. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, dimana untuk tanggapan pertama di berikan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya pastikan sudah memenuhi persyaratan untuk menjabat masing-masing tugasnya, dan sampai saat ini, BUMDes Fathonah juga masih berjalan dengan baik, dan khususnya untuk batasan pinjaman, saya rasa sudah ditetapkan batasan pinjaman maksimal yang dapat di manfaatkan masyarakat, bukan hanya masyarakat mampu, semua nasabah wajib menerima aturan tersebut”. (Wawancara 8 Januari 2019, M. Iwan Kusmawan, Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari)

Pembahasan selanjutnya adalah penyajian hasil wawancara yang diberikan oleh informan penulis yaitu Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dimana beliau bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes Fathonah tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Pembatasan pinjaman ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat mampu, kita tidak membeda-bedakan, batasannya sudah jelas, maksimal pinjaman itu ada di angka Rp 20.000.000,- / Nasabah, dan saya rasa itu sudah adil dan diterapkan bagi seluruh nasabah dari BUMDes Fathonah”. (Wawancara, 9 Januari 2018, Hadi Muslim, S.Ag Ketua BPD, Pengawas BUMDesa Fathonah)

Untuk melengkapi jawaban di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak Sujarwana, dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator yang pertama adalah sebagai berikut:

“Profesional pastinya, kita diberikan tugas yang harus kita pertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalui perangkat Desa, apabila tidak profesional, maka tentunya saya tidak akan ada di sini untuk memberikan keterangan kepada saudara”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pembatasan terhadap nasabah BUMDes Fathonah sudah dilakukan, dimana masing-masing nasabah mendapatkan batasan pinjaman dana yang mencapai hingga Rp 20.000.000,- /KK. Hal ini berlaku bukan hanya kepada nasabah yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas saja, tetapi berlaku bagi seluruh nasabah yang ada di BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif untuk dijadikan rekomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif karena ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut. Jadi ketepatan dapat dilihat dari tujuan yang telah dibuat dengan yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dan juga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan program yang ada. dan untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Nasabah terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Pengawasan terhadap nasabah BUMDes	15 (20%)	36 (47%)	25 (33%)	76 (100%)
2	Memiliki manfaat kepada masyarakat dan pemerintah	26 (34%)	35 (47%)	14 (18%)	76 (100%)
Jumlah		41	71	39	152
Rata-Rata		21	35	20	76
Persentase		28%	46%	26%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator keenam yang membahas tentang “Ketepatan” dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata 21 orang responden (28%) yang memberikan jawaban pada pilihan kategori “Baik”, adapun alasannya nasabah sudah merasakan manfaatnya terhadap program BUMDes, dan juga sudah melaksanakan pengawasan terhadap nasabah BUMDesa. Selanjutnya responden nasabah yang memberikan jawaban pada kategori “Cukup Baik” rata-rata berjumlah 35 Orang responden (46%), hal ini dikarenakan pihak nasabah sudah merasakan manfaat dari program BUMDes, tetapi masih ada bagi mereka yang merasa bahwa pihak BUMDes hanya focus di pemberian pinjaman saja, tetapi tidak dapat merasakan program BUMDes seperti pemberian pembinaan dalam upaya pengembangan usaha yang ada di Desa Lubuk Kembang Sari.

Sementara untuk pilihan jawaban pada kategori “Kurang Baik”, rata-rata responden menjawab 20 orang responden (26%). Adapun alasan untuk nasabah yang memberikan pendapat mereka pada kategori kurang baik, beralasan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap nasabah BUMDes masih sangat kurang, hal ini dikarenakan bahwa pada kenyataannya masih banyak nasabah yang menunggak dan itu artinya bahwa pengawasan kurang dilakukan kepada pihak nasabah.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, maka penulis akan memberikan penyajian hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing informan penulis yang berasal dari perwakilan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah yaitu Bapak M. Iwan Kusmawan, selanjutnya adalah Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) yaitu Bapak Hadi Muslim,

S.Ag. dan informan yang terakhir adalah Direktur BUMDesa Fathonah yaitu Bapak Sujarwana. Dalam penyajian wawancara ini, penulis memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing pembahasan pada indikator di atas, dimana untuk tanggapan pertama di berikan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang Sari Sebagai Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentunya sangat bermanfaat baik bagi pemerintah desa dan juga masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari, karna saling menguntungkan pastinya, dan pada dasarnya, BUMDes ini kan usaha milik desa yang dipertanggung jawabkan oleh Desa kepada pemerintah Kabupaten, dan secara keseluruhan, proses pelaksanaan program ini mendapatkan pengawasan baik dari pusat sampai kepada nasabahnya”. (Wawancara 8 Januari 2019, M. Iwan Kusmawan, Komisari (Penasehat) BUMDesa Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari)

Pembahasan selanjutnya adalah penyajian hasil wawancara yang diberikan oleh informan penulis yaitu Pengawas BUMDesa Fathonah (Ketua BPD) Bapak Hadi Muslim, S.Ag. dimana beliau bertindak sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan BUMDes Fathonah tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Dilakukan pengawasan pastinya, karna saya sendiri yang menjadi bagian dari pengawas BUMDes Fathonah di Desa Lubuk Kembang Sari, dan selama ini pengawasan yang kita lakukan itu tentunya audit keuangan, pelaksanaan kegiatan, bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan BUMDes itu sendiri, dan hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kegiatan BUMDes Fathonah tersebut”. (Wawancara, 9 Januari 2018, Hadi Muslim, S.Ag Ketua BPD, Pengawas BUMDesa Fathonah)

Untuk melengkapi jawaban di atas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan direktur BUMDes Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, dimana dalam hal ini adalah Bapak

Sujarwana, dan keterangan yang diberikan oleh beliau terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan indikator yang pertama adalah sebagai berikut:

“Saya kira sudah sangat jelas manfaat yang diterima oleh masyarakat, mereka dapat terbantu finansialnya, dan untuk desa juga bisa menambah pendapatan Desa juga, dan program ini diawasi oleh aparat pemerintah di Desa dan Kecamatan, dan juga ada BPD yang melakukan pengawasan”. (Wawancara 9 Januari 2019, Bapak Sujarwana. Direktur BUMDes Fathonah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pengawasan yang dilakukan terhadap BUMDes Fathonah sudah dilakukan oleh masing-masing bidang yang memiliki tugas terhadap proses pengawasan tersebut, seperti Kepala Desa, BPD, Pihak Kecamatan juga terlibat, dan masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari juga ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap program tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing indikator yang ada di atas, maka penulis akan melakukan penghitungan secara keseluruhan dari masing-masing hasil penelitiannya, dan adapun hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi dibawah ini.

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Dsa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Efektivitas” kemudian indikator yang kedua adalah “Efisiensi”, indikator ke tiga “Kecukupan” dan indikator ke empat adalah “Pemerataan”, dan indikator yang ke lima adalah “Responsivitas” , serta indikator yang ke enam adalah “Ketepatan” dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis

melakukannya di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-enam indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden. Jadi ke-enam indikator ini dijabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarakan pada masyarakat (nasabah).

Tabel V.10 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Nasabah Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	17 (22%)	30 (40%)	29 (38%)	76 (100%)
2	Efisiensi	11 (14%)	32 (42%)	33 (44%)	76 (100%)
3	Kecukupan	15 (20%)	25 (33%)	36 (47%)	76 (100%)
4	Pemerataan	16 (21%)	33 (43%)	27 (36%)	76 (100%)
5	Responsivitas	18 (24%)	31 (41%)	27 (35%)	76 (100%)
6	Ketepatan	21 (28%)	35 (46%)	20 (26%)	76 (100%)
Jumlah		98	186	172	456
Rata-Rata		16	31	29	76
Persentase		21%	41%	38%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.10 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” yaitu 31 orang responden (41%).

Dengan demikian, maka kesimpulan dari jawaban yang diberikan oleh responden Nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari ada pada jawaban dengan kategori “Cukup Baik”. Hal ini di dapatkan dengan alasan bahwa pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Desa Lubuk Kembang Sari sudah berjalan cukup baik, dan proses simpan pinjam juga sudah berjalan dari tahun 2015 hingga saat ini, akan tetapi di dalam pelaksanaannya, beberapa tugas dan fungsi dari BUMDesa Fathonah belum dilaksanakan dengan baik, seperti pembahasan pada indikator yang ke 2 (dua), permasalahan pada indikator ini adalah terkait dengan “Pembayaran Keredit” yang dilakukan oleh nasabah, dimana masih banyak nasabah yang melakukan penunggakan dan belum di tindak lanjuti oleh pihak pengurus BUMDes Fathonah, selanjutnya adalah pada pembahasan indikator yang ke 3 (tiga) tentang “Memberikan Pembinaan dan Pelatihan Kerja kepada Nasabah”, hal ini belum dilakukan oleh pengurus BUMDesa Fathonah kepada nasabahnya. Dengan alasan-alasan tersebut, maka responden Nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Desa Lubuk Kembang Sari memberikan jawaban mereka pada kategori jawaban yaitu “Cukup Baik”

D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Dalam menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari, tentunya pengurus pernah mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pengurus tersebut, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

1. Hambatan yang dialami oleh pengelola BUMDesa Fathonah adalah terkait dengan pembayaran kredit yang macet oleh nasabah, dimana jumlah nasabah yang melakukan penunggakan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 119, dengan kategori peminjam belum lunas dengan tunggakan biasa adalah sebanyak 65 orang, dan nasabah yang melakukan penunggakan dengan jatuh tempo adalah sebanyak 54 Orang nasabah.
2. Penunggakan yang terjadi akibat macetnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut, sehingga modal yang di pinjam dari BUMDesa tidak dapat di jalankan dan tidak menghasilkan.
3. Banyak Nasabah yang melakukan peminjaman dan memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk keperluan rumah tangga dan pribadi mereka, dengan demikian uang yang di pinjam tidak dapat berkembang dan menghasilkan, sehingga berdampak kepada proses pembayaran kredit yang macet.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian yang membahas tentang “Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Didesa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan” dapat dikategorikan berjalan dengan “Cukup Baik” Hal ini di dapatkan dengan alasan bahwa pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lubuk Kembang Sari sudah berjalan cukup baik, dan proses simpan pinjam juga sudah berjalan dari tahun 2015 hingga saat ini, akan tetapi di dalam pelaksanaannya, beberapa tugas dan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fathonah belum dilaksanakan dengan baik, seperti pembahasan pada indikator yang ke 2 (dua), permasalahan pada indikator ini adalah terkait dengan “Pembayaran Keredit” yang dilakukan oleh nasabah, dimana masih banyak nasabah yang melakukan penunggakan dan belum di tindak lanjuti oleh pihak pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fathonah, selanjutnya adalah pada pembahasan indikator yang ke 3 (tiga) tentang “Memberikan Pembinaan dan Pelatihan Kerja kepada Nasabah”, hal ini belum dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fathonah kepada nasabahnya.

Dalam menjalankan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Desa Lubuk Kembang Sari, tentunya pengurus pernah mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pengurus tersebut, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

4. Hambatan yang dialami oleh pengelola BUMDesa Fathonah adalah terkait dengan pembayaran kredit yang macet oleh nasabah, dimana jumlah nasabah yang melakukan penunggakan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 119, dengan kategori peminjam belum lunas dengan tunggakan biasa adalah sebanyak 65 orang, dan nasabah yang melakukan penunggakan dengan jatuh tempo adalah sebanyak 54 Orang nasabah.
5. Penunggakan yang terjadi akibat macetnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut, sehingga modal yang di pinjam dari BUMDesa tidak dapat di jalankan dan tidak menghasilkan.
6. Banyak Nasabah yang melakukan peminjaman dan memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk keperluan rumah tangga dan pribadi mereka, dengan demikian uang yang di pinjam tidak dapat berkembang dan menghasilkan, sehingga berdampak kepada proses pembayaran kredit yang macet.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Fathonah Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan

Ukui. Kemudian saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat selaku nasabah dari BUMDes Fathonah tersebut dan juga pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas adalah:

1. Penulis menyarankan kepada pengurus dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Fathonah agar lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pemberian sanksi kepada nasabahnya, hal ini dikarenakan pada faktanya dilapangan, nasabah yang melakukan penunggakan cukup banyak dan proses pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh mereka belum mendapatkan kepastian kapan akan dilunasi.
2. Saran penulis kepada pengurus juga membahas tentang pemberian himbauan, pembinaan, penyuluhan dan arahan-arahan kepada nasabahnya agar mampu mengelola keuangan mereka dari hasil pinjaman di BUMDesa Fathonah, hal ini dikarenakan dengan adanya proses pembinaan, maka masyarakat akan mampu dan mempunyai kemampuan baru untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan.
3. Saran yang terakhir adalah terkait dengan pemberian persyaratan calon nasabah, dimana hal ini dikarenakan banyak nasabah yang memanfaatkan dana BUMDesa untuk keperluan bukan pengembangan usaha, melainkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga dana yang dipinjam menjadi dana mati dan tidak menghasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi : Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Ancok, Djamaludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta, Erlangga
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Riau, RedPost Press
- Awang, azam. 2006. *Otonomi Desa & Partisipasi Masyarakat: Kajian Pergeseran Striktur Dan Fungsi Desa Di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfa beta
- Hasibuan, Malayu S.P . 2014. *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kauzes, James M. 2006. *5 Teladan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Samsudin, Sadi. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, CV Pustaka Setia
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*. Bandung. CV Mandar maju
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Refisi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sufian. 1997. *Sumber Daya manusia*. Pekanbaru. UIR Press
- Sule, Erni Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Kencana
- Sutarto, 1984. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- _____, 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- _____. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta, Rineka Cipta

Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan Dan Manajemen*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada

William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta.

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press

DOKUMENTASI :

UU No.06 tahun 2014 tentang Desa

Permendes No.04 tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa

